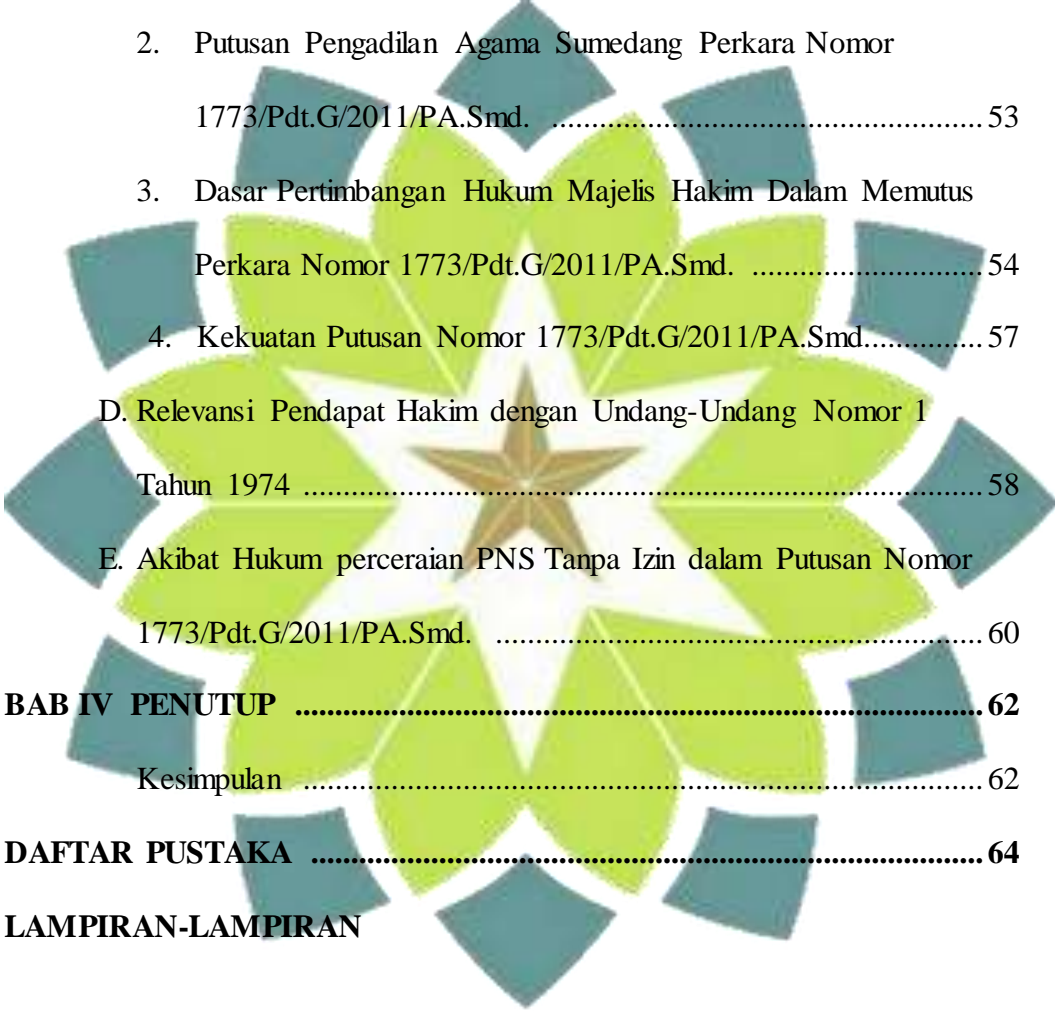


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Langkah-langkah Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Perkawinan dan Putusnya Perkawinan	13
1) Perkawinan	13
a. Menurut Hukum Islam	13
b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan	17
2) Putusnya Perkawinan	20
a. Perceraian Menurut Hukum Islam	21
b. Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan	27
B. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	33
C. Asas Umum Peradilan Agama	37
D. Putusan dan Yurisprudensi	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Tata Cara Pengajuan Izin Bercerai bagi PNS Terhadap BKD	46



B. Proses Pemberian Izin Cerai dari BKD terhadap PNS	50
C. Landasan Hukum Yang dipergunakan Oleh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian PNS Tanpa Izin	52
1. Posisi Kasus Perkara Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd.	52
2. Putusan Pengadilan Agama Sumedang Perkara Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd.	53
3. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd.	54
4. Kekuatan Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd.....	57
D. Relevansi Pendapat Hakim dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	58
E. Akibat Hukum perceraian PNS Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd.	60
BAB IV PENUTUP	62
Kesimpulan	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	